

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada zaman masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani, Aceh dan semenanjung Tanah Melayu telah melalui suatu zaman yang berbeda dari yang pernah dialami sejak Sultan Iskandar Muda masih berkuasa. Khususnya, kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani tidak lagi mengikuti sistem pemerintahan yang dijalankan pada waktu masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memerintah. Sebagai seorang pemimpin, Sultan Iskandar Tsani menumpukkan perhatiannya ke arah pembangunan masyarakat dan mengembangkan pendidikan Islam. Usahanya untuk menyebarkan ajaran Islam tidak saja terbatas di daerah-daerah yang berdekatan dengan Aceh besar malah baginda juga mengirimkan surat dan dua buah kitab yaitu “*Surat al-Mustaqin*” dan “*Babun Nikah*”, karangan Syaikh Nuruddin ar-Raniry, seorang ulama besar Aceh abad ke 17 M, kepada sultan kedah, ketika mengetahui bahwa Islam telah berkembang dengan pesatnya disana (Muliadi Kurdi, 2009: 119).

Politik Sultan Iskandar Thani yang lebih lunak dari pada Sultan Iskandar Muda yang lebih tegas dan berani dalam menghadapi musuh atau lawannya menyebabkan kerajaan Aceh yang berkaitan dengan semenanjung tanah Melayu semakin terjepit.

Misalnya, Pahang, yang setuju berdamai dengan Aceh karena sultan Aceh (Sultan Iskandar Tsani) adalah berasal dari keturunan raja-raja Pahang, telah dicerobohi oleh Pahang sendiri.

Peristiwa tersebut, sebenarnya telah bermula sejak awal tahun 1636. Pada waktu itu, atas persetujuan para pembesar Pahang Iskandar Tsani telah mengikatkan perdamaian dengan negeri itu dan menerimanya sebagai wilayah naungan Aceh. Kejadian ini membangkitkan kemarahan Johor, lebih-lebih lagi karena beliau pernah menguasai negeri Pahang pada masa dahulu. Dengan alasan tersebut, pada tahun 1638, dengan bantuan sekutunya V.O.C yang berpusat di Batavia, Jawa, kerajaan Johor secara mengejutkan menyerang negeri Pahang. Pada saat terjadi kekacauan di Pahang, Iskandar Tsani telah mengirimkan satu rombongan dari Aceh untuk memasang beberapa buah batu nisan di pekuburan kerabatnya di Pahang (Muliadi Kurdi, 2009: 120).

Meskipun demikian, Sultan Iskandar Tsani tidak ikut campur tangan untuk mengamankan suasana di negeri Pahang. Selanjutnya juga tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Sultan Iskandar Tsani pernah membantah terhadap serangan-serangan Johor tersebut dengan memberi teguran kepada Sultan Johor secara pribadi. Sebaliknya, Sultan Iskandar Tsani hanya menghantarkan satu teguran keras kepada penguasa V.O.C dan menarik kembali persetujuannya untuk menolong pihak Belanda dalam menyerang kota Malaka. Sikap Sultan Iskandar Tsani yang dianggap kurang tegas tersebut terjadi karena Beliau sudah tidak mau dan tidak mampu lagi untuk melibatkan dirinya dalam satu peperangan yang besar, dan memandang bahwa armada yang dimilikinya telah lemah dan tidak sekuat dulu.

Sikap Sultan Iskandar Tsani telah membuat Belanda semakin berani dan melakukan kerja sama dengan Johor untuk mengepur Malaka pada Juni 1640. Walaupun kedudukan mereka sungguh mencemaskan, namun para pejuang Portugis terus memberi tantangan yang hebat terhadap tentara sekutu itu. Dalam keadaan yang demikian, Malaka jatuh juga akhirnya pada bulan Januari 1641, peristiwa yang penting tersebut berlalu tanpa mendapat tantangan ataupun reaksi dari kerajaan Aceh. Kondisi ini sungguh mengherankan karena selama satu abad sebelumnya, para putera Aceh telah mengirbankan nyawa. Kejatuhan Malaka telah mengakhiri sengketa lama antara Aceh dan negeri-negeri di Semenanjung, khususnya Johor (Muliadi Kurdi, 2009: 121).

Kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani tidak setegas dan secakap Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani lebih memiliki sikap yang lunak dan kurang perhatian terhadap dunia politik dan memerintah Aceh lebih liberal, sehingga menyebabkan wilayah-wilayah taklukkan Aceh mengambil kesempatan untuk membebaskan diri dari kerajaan Aceh Darussalam. Satu-persatu daerah wilayah taklukan yang berada dibawah pemerintahan Aceh di Semenanjung Tanah Melayu perlahan-lahan melepaskan diri dari kerajaan Aceh Darussalam dan kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah taklukkan Sumatera.

Menurut Veth, dalam buku "Aceh Sepanjang Abad" yang dikutip oleh Mohammad Said (1961: 298) bahwa:

Sultan Iskandar Tsani bersikap adil, bijaksana, dan pengasih pada rakyatnya. Pemerintahannya mengeluarkan larangan bekerja bago anak-anak di bawah umur. Beliau suka mengampuni orang-orang yang bersalah dan meminta maaf kepadanya. Pada masa menjabat selama delapan bulan, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Sultan Iskandar Tsani di istananya dengan cara meracuni makanannya. Namun Allah masih melindunginya dengan beliau tidak memakan makanan tersebut, dan setelah diperiksa ternyata memang benar di dalam makanan tersebut ada racun. Segera setelah peristiwa itu terjadi beliau

melakukan pemeriksaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya diperiksa oleh qadhi malikul 'adil dan mereka yang bersalah dijatuhi hukuman yang setimpal.

Orang yang pernah mendapat ampunan dari Sultan Iskandar Tsani antara lain adalah seorang tawanan Portugis dari masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Permohonan ampun mereka disetujui oleh Sultan Iskandar Tsani, namun setelah dibebaskan mereka kembali membuat onar. Oleh sebab itu mereka pun kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Bangsa Portugis menilai politik yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Tsani sangat lunak dibandingkan dengan politik yang keras dan tidak kenal damai yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda (Mohammad Said, 1961: 299).

Berbeda dengan pendahulunya, dalam pemerintahannya, Sultan Iskandar Tsani lebih memperhatikan pembangunan dalam negeri daripada politik ekspansi. Oleh sebab itu, meskipun hanya memerintah selama lima tahun, Aceh mengalami suasana damai. Hukum yang berdasarkan syariat Islam ditegakkan, bukannya kekuasaan yang sewenang-wenang. Hubungan dengan wilayah taklukan berjalan dengan suasana liberal, bukan tekanan politik atau militer.

Masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani juga ditandai oleh perhatian-perhatian beliau terhadap studi agama Islam. Berkembangnya studi Agama Islam di bumi Aceh khususnya di kerajaan Aceh Darussalam turut didukung oleh seorang ulama terkemuka bernama Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, beliau merupakan seorang ulama besar dari Gujarat yang menulis sebuah kitab tentang sejarah Aceh yang berjudul "*Bustanu's Salatin*". Maka, sepeninggalan Sultan Iskandar Tsani, Aceh mengalami kemunduran. Kerajaan Aceh Darussalam tidak mampu berbuat banyak saat sejumlah wilayah taklukan Aceh melepaskan diri. Kerajaan Aceh Darussalam juga tidak

mampu lagi berperan sebagai pusat perdagangan. Meskipun demikian, kerajaan Aceh Darussalam tetap berjalan dengan utuh dan bahkan sampai memasuki abad ke-20 yang dipegang dan dipimpin oleh empat orang Sultanah setelah meninggalnya Sultan Iskandar Tsani (Sumber: jurnal kepemimpinan sultan iskandar tsani. Diakses pada 30 April 2018).

Mewarisi kejayaan besar dari mertuanya yaitu Sultan Iskandar Muda, disertai dengan tempramen dan sifat Sultan Iskandar Tsani yang lembut dan lunak serta permaisurinya yang cerdas, maka Sultan Iskandar Tsani memiliki kesempatan untuk menitik beratkan program utama pemerintahannya pada masa itu pada ilmu pengetahuan agama Islam dan kesusastraan. Selain itu, Sultan Iskandar Tsani menyempurnakan aturan termasuk tata pengadilan dan peradilan (Thamrin Z dan Edy Mulyana, 2007: 48).

Pada masa pemerintahan Sultan Iskadar Tsani, Aceh dan Semenanjung Tanah Melayu telah melalui suatu zaman yang berbeda dari yang pernah dialami sejak masa Sultan Iskandar Muda berkuasa. Khususnya kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani tidak lagi mengikuti satu dasar luar yang militan. Sebagai seorang yang wara', Sultan Iskandar Tsani menumpukan perhatiannya kearah pembangunan masyarakat dan mengembangkan pendidikan Islam. Usahanya untuk menyebarkan ajaran agama Islam tidak hanya terbatas di daerah-daerah yang berdekatan dengan Aceh Besar saja, namun Sultan Iskandar Tsani juga mengirimkan surat-surat dan dua buah kitab yaitu "Surat al-Mustaqim" dan "Babun Nikah" karangan Syeikh Nuruddin ar-Raniry, yang merupakan seorang ulama besar Aceh pada masa abad ke 17 M, kepada Sultan Kedah, ketika mengetahui bahwa Islam telah berkembang dengan pesat disana.

Sementara itu, Johor memiliki peranan dalam jatuhnya Portugis di Malaka. Namun Johor tidak mendapat keuntungan apapun yang dapat dibanggakan. Pada 15 Februari 1641, lebih kurang satu bula sesudah tamatnya kekuasaan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Tsani pun mangkat dari jabatannya. Sejak saat itu, nasib kerajaan Aceh Darussalam dan rakyatnya langsung mengalami perubahan, khususnya pada bidang pemerintahannya. Pemerintahan Aceh tidak lagi memiliki kuasa yang benar-benar disegani oleh kerajaan lain. Setelah Sultan Iskandar Tsani mangkat dari jabatannya sebagai seorang Sultan kerajaan Aceh Darussalam, Aceh dipimpin oleh para ratu yang berjalan dan bertahan selama 59 tahun. Hal tersebut bermula dari naiknya istri Sultan Iskandar Tsani sebagai pemimpin kerajaan Aceh yang diberi gelar *Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah* (1641-1675), yang meneruskan atau menggantikan Sultan Iskandar Tsani memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Namun setelah beliau mangkat, maka beliau digantikan oleh tiga orang sultanah lainnya yang mengakibatkan kekuasaan Aceh semakin menurun dalam aspek-aspek politik, ekonomi, dan militer. Tetapi, masih berkembang dan meningkat dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni (Muliadi Kurdi, 2009: 121).

Dalam masa rentang waktu 59 tahun, kejayaan kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh 4 orang wanita (sultanah) mengalami kemunduran dan menghilang serta tidak sedikitpun disegani apalagi ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dalam memimpin, tidak tegas, dan terlalu lemah, dan yang paling penting adalah bukan kodratnya wanita menjadi pemimpin, karena sejatinya laki-lakilah yang memegang peranan sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, hal tersebut menjadi pelajaran besar bagi kita semua sebagai generasi penerus Aceh di masa mendatang.

2.1 Kebijakan Sultan Iskandar Tsani Dalam Bidang Keagamaan

Pengaruh nilai-nilai Islami sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan kesultanan Aceh. Sejak agama Islam masuk dan berkembang di Aceh yang bahkan sanggup mempengaruhi seluruh Nusantara terutama melalui perdagangan antara masyarakat Aceh dengan masyarakat luar Aceh. Struktur pemerintahan kerajaan Aceh dalam konteks sistem pemerintahan berdasarkan Qanun Meukuta Alam yang telah diwariskan oleh Sultan Iskandar Muda (Badruzzaman Ismail, 2013: 14).

Hal tersebut karena besarnya pengaruh ajaran agama Islam yang telah mendarah daging di dalam jiwa dan raga masyarakat Aceh sejak masuk dan berkembangnya ajaran agama Islam di bumi Aceh hingga sampai sekarang ini, membuat agama Islam adalah sebagai tiang atau pilar utama dalam sebuah negara atau kerajaan Aceh. Oleh sebab itu, ajaran agama Islam terus dipertahankan dan menjadi satu kesatuan dengan orang-orang Aceh dari masa lalu hingga sampai saat sekarang ini.

Semenjak awal berdirinya kerajaan Aceh Darussalam, sultan-sultan Aceh selalu berdampingan dengan para ulama-ulama. Ulama dan sultan (umara) sudah menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya karena sudah saling berkaitan. Kerajaan Aceh Darussalam yang menjadikan ulama sebagai penasehat kerajaan sekaligus juga dapat bergerak dibidang lainnya membuat kerajaan Aceh Darussalam sebagai kerajaan yang bersyariat, Islami, bermartabat dan disegani oleh kerajaa-kerajaan lain (Muliadi Kurdi, 2009: 107).

Sebelum Sultan Iskandar Muda wafat, beliau telah menunjuk menantunya yaitu Iskandar Tsani sebagai penerus atau penggantinya menjadi sultan. Pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, ulama yang situnjuk sebagai *Qhadi Malikul 'Adil* dan

bertanggung jawab tentang masalah keagamaan adalah Syekh Syamsuddin as-Sumatrani. Sebagaimana yang kita ketahui paham yang diajarkan oleh Syamsuddin as-Sumatrani adalah paham *Wahdatul Wujud*. Setelah wafatnya Syekh Syamsuddin as-Sumatrani paham tersebut menyeleweng kearah panteisme dan menimbulkan kekacauan, baik di dalam bidang politik, ekonomi, maupun keberagamaan. Keadaan yang sangat kacau tersebut dikendalikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang menjabat sebagai sultan baru di Kerajaan Aceh Darussalam. Oleh karena itu, beliau sangat membutuhkan seorang ulama yang bisa mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut (Musyfirah Sunanto,2007: 279).

Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai Kerajaan Aceh tersebut tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional pada masa itu. Ramainya aktivitas pelayaran perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan Kerajaan Aceh, mempengaruhi perkembangan kehidupan Kerajaan Aceh dalam segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya.

Pada masa kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani Alauddin Mughayat Syah, ulama-ulama Aceh sangat berperan aktif sebagai penasehat hukum istana dan negara, dan juga ulama-ulama Aceh menjadi penyuluh agama bagi masyarakat luas. Pada akhir-akhir abad ke 16 sampai abad ke 19 M, kerajaan Aceh Darussalam mampu menggalang kekuatan para ulama untuk menyebarkan hukum Islam ke seluruh Nusantara. Terdapat beberapa nama ulama yang sangat terkenal di Nusantara seperti Hamzah Fansury, Syamsuddin as-Sumatrany, Nuruddin ar-Raniry, dan Abdul Rauf as-Singkily. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani

yang hanya menjabat selama lima tahun, ulama yang ditunjuk oleh Sultan Iskandar Tsani sebagai penasehat kerajaan adalah Syeikh Nuruddin ar-Raniry (Muhammad Thalal, dkk, 2010: 5).

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani, Nuruddin ar-Raniry dipilih oleh Sultan Iskandar Tsani sebagai *Qadhi Malikul Adil* dan *Mufti Muaddam* karena menurut Sultan Iskandar Tsani, Nuruddin ar-Raniry adalah sosok yang hebat, yang pada dasarnya beliau adalah seorang sufi, teolog dan faqih. Selain itu juga Nuruddin ar-Raniry adalah seorang pengarang, penasehat dan politikus. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani, Nuruddin ar-Raniry memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik dan bertanggung jawab dalam urusan keagamaan (Hasbi Amiruddin, 2008: 39).

Beliau tidak hanya berperan sebagai penasehat kerajaan, tetapi juga beliau mampu berkecimpung di beberapa bidang lainnya. Oleh sebab itu Sultan Iskandar Tsani menyerahkan jabatan *Qadhi Malikul Adil* dan *Mufti Muaddam* kepada Nuruddin ar-Raniry. Kebijakan Sultan Iskandar Tsani dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam didasari dengan kecintaan beliau terhadap ilmu agama dan pentingnya ilmu pengetahuan agama dalam segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu beliau lebih mengedepankan urusan ilmu pengetahuan agama dari pada politik dimasa kepemimpinannya memimpin kerajaan Aceh Darussalam.

